

PERAN PENYULUH SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR ANAK RUMAH TANGGA MISKIN
DI KELURAHAN CIPINANG KECAMATAN PULO GADUNG



JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1433 H/2012 M

PERAN PENYULUH SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR ANAK RUMAH TANGGA MISKIN
DI KELURAHAN CIPINANG KECAMATAN PULO GADUNG

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk
Memenuhi Syarat-syarat mencapai Gelar
Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos.I)



Universitas Islam Negeri
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Oleh :

Noriez Asep Franzika

107052002103

Dengan Dosen Pembimbing:

Dr. Suparto, M.Ed

NIP. 19710330 199803 1 004

JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1433 H/2012 M



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat
Website: www.fdkuinjakarta.ac.id

Telepon/Fax: (021) 7432728/74703580
E-mail : dakwah@fdk.uinjakarta.ac.id

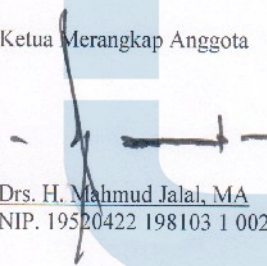
PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul **Peran Penyuluh Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu, 16 Januari 2013. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos.I) pada Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

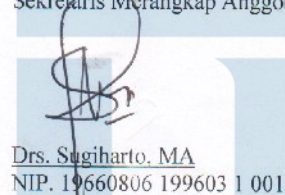
Jakarta, 30 Januari 2013

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota


Drs. H. Mahmud Jalal, MA
NIP. 19520422 198103 1 002

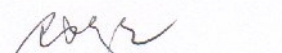
Sekretaris Merangkap Anggota

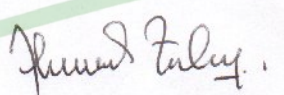

Drs. Sugiharto, MA
NIP. 19660806 199603 1 001

Anggota

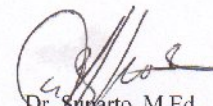
Penguji I

Penguji II


Kholis Ridho, M.Si
NIP. 19780114 200912 1 002


Ahmad Zaky, M.Si
NIP. 19771127 200710 1 001

Pembimbing


Dr. Suparto, M.Ed
NIP. 19740330 199803 1 004

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata I (SI) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 16 Januari 2013

Penulis

Noriez Asep Franzika



ABSTRAK

Noriez Asep Farnzika

Peran Penyuluh Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung.

Pendidikan menjadi hal terpenting dalam kehidupan, banyak dampak yang dimunculkan dari anak-anak yang putus sekolah, kita melihat mereka dijalanan dengan berbagai profesi yang mereka lakukan, tidak terpenuhi pendidikan dasar, tentunya akan mempengaruhi masa depan anak. Mereka yang tidak bersekolah, karena kecilnya pendapatan orang tua. Dari banyaknya angka pendidikan anak yang belum menjalankan wajib belajar sembilan tahun, maka dalam program keluarga harapan yang salah satu programnya yaitu pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Agar program ini berjalan dengan baik, maka dilakukanlah penyuluhan sosial, sosialisasi ini diberikan kepada rumah tangga sangat miskin.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyuluhan keliling pada program keluarga harapan, mendapatkan suatu bentuk pendekatan-pendekatan yang dilakukan penyuluh. Tujuan lain ialah untuk mengetahui peran penyuluh sosial pada program keluarga harapan, diantaranya dalam meningkatkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin. Metodologi penelitian karya ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lekxsi J. moeleong, adalah “prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Hasil penelitian ini penulis temukan terkait dengan peran penyuluh dalam program keluarga harapan adalah melalui penyuluhan sosial yang dilakukan dalam penyampaian informasi, komunikasi dan edukasi dalam peningkatan partisipasi sosial. Dengan demikian penulis tertarik untuk menulis tentang ” Peran Penyuluh Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wataala* karena atas kuasa-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan. Rahmat dan keselamatan semoga tetap dapat tercurah kepada Nabi Muhammad *shollallahu alaihi wasallam*. Kedatangannya ke dalam kehidupan ini telah menjadikan sebaik-baiknya kehidupan.

Skripsi ini yang berjudul “Peran Penyuluh Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin Di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung” ini disusun untuk menempuh siding akhir sarjana Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada kesempatan ini, terima kasih sebesar-besarnya diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Ibu dan bapak yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materil yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Oma telah memberikan dorongan moril dan materil yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Dr. Arief Subhan, M.Ag, bersama Pembantu Dekan II Drs. H. Mahmud Jalal, MA, Pembantu Dekan III Drs. Study Rizal LK, MA;

4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bimbingan penyuluhan Islam Dra. Rini Laili Prihatini, M.Si.
5. Yang terhormat Dr. Suparto, MA selaku dosen pembimbing skripsi ini yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Drs. Sugiharto, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam;
7. Yang terhormat dosen penasehat akademik Drs. M. Lutfi, MA yang senantiasa memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
8. Seluruh pengajar jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah mengamalkan seluruh ilmu-ilmunya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasinya yang senantiasa tulus dalam mengajar, mendidik dan membimbing terhadap mahasiswa, khususnya penulis;
9. Seluruh karyawan staf administrasi, staf perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan staf perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memudahkan penulis untuk mendapatkan berbagai referensi dalam penyelesaian Skripsi ini;
10. Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian tentang “Peran Penyuluh Agama Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak

Rumah Tangga Miskin Di Kelurahan Cipinang” dan para penyuluh sosial yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai.

11. Semua pihak yang telah ikhlas membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, Ibuk Misnawati, SE, Ibuk Early Febriana, S.Sos, M.si, Ibuk Tami, A.Ks, Ibuk Siti Nurhayati, A.Ks, selaku Penyuluh Sosial dan Bapak Cecep Sulaiman M.Si Kepala Seksi Pengembangan sosial yang telah bersedia untuk di wawancarai

12. Ibuk-Ibuk para peserta program keluarga harapan, yang telah bersedia untuk di wawancarai Ibuk Endang Rahayu, Mutia, Dairah, Murti Tuminah, Rita, Sumiati, dan bapak galih selaku pendamping di Kelurahan Cipinang, Semoga Allah subhanahu wataala memberikan balasan atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan dengan tulus kepada penulis.

Seluruh isi skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis. Oleh sebab itu, isi skripsi ini sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang membutuhkan pada umumnya dan Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada khususnya.

Jakarta, 31 Desember 2012

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 6

D. Metodologi Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 11

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II

Landasan Teoritis

A. Peran

1. Pengertian Peran 17

B. Penyuluhan Agama

1. Pengertian Penyuluhan Agama 18

2. Pengertian Penyuluh Agama Fungsional dan Penyuluh

Agama Honorer	19
3. Penyuluhan dan pembangunan umat	22
4. Prinsip Dasar Penyuluhan	27
C. Partisipasi	
1. Pengertian Partisipasi	29
2. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi.....	30
3. Bentuk - Bentuk Partisipasi.....	32
D. Kemiskinan	
1. Pengertian Kemiskinan dan Rumah Tangga Miskin	34
2. Penyebab Kemiskinan	36
3. Ciri-ciri masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.....	35
E. Pandangan Islam Terhadap Pendidikan dan Kemiskinan.	
1. Pandangan Islam Terhadap Pendidikan	40
2. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan	46
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN	
A. Program Keluarga Harapan.....	57
B. Komponen pendidikan dalam PKH	60
C. PKH dan KEMISKINAN	61
D. Kewajiban Peserta PKH.....	63

BAB IV	A. TEMUAN DAN ANALISA DATA LAPANGAN	
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Sosial/ Penyuluhan Keliling pada Program Keluarga Harapan di kelurahan Cipinang.	76
	2. Peran penyuluh agama pada program keluarga harapan dalam meningkatkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin di Kelurahan Cipinang	79
	3. Kesesuaian Penyuluh Agama dalam peningkatan partisipasi belajar melalui program penyuluhan di Kelurahan Cipinang khususnya peserta program keluarga harapan	86
BAB V	PENUTUP	
	1. Kesimpulan.....	91
	2. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pengembangan sumber daya manusia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Langkah yang dilakukan antara lain memfokuskan pembangunan pada bidang pendidikan. Mengingat, maju mundurnya atau berkualitas tidaknya sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pelaksanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan hanya dapat diketahui dari kualitas individu, melainkan juga keterkaitan erat dengan kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas anak didik dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu/kualitas layanan pendidikan. Karena masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dalam melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹ Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.168.

Komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 tahun), khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan untuk mengurangi angka pekerja anak. Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik (*Enrollment*) dan memenuhi jumlah kehadiran (*Attendance*) yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar, diharapkan PKH akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Dan hal ini mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dengan persyaratan kehadiran minimal 85%, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, ketersediaan tenaga pendidik yang handal.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.²

Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama yang paling bertanggungjawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik adalah kedua orang tua. Islam memerintahkan kedua orang tua untuk mendidik

² Undang-undang republic Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, diterbitkan Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2008, hlm.111.

diri dan keluarganya, terutama anak-anaknya, agar mereka terhindar dari azab yang pedih. Firman Allah :

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, diantaranya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras-keras yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim:6).³

Selama anak belum dewasa, orang tua mempunyai peranan pertama atau utama bagi anak-anaknya. Untuk membawa anak kepada kedewasaan, orang tua harus memberi contoh yang baik karena anak suka mengimitasi kepada orang tuanya. Dalam memberikan sugesti pada anak diharapkan tidak menggunakan cara otoriter, melainkan dengan sistem pergaulan sehingga dengan senang akan melaksanakannya.

Setiap anak lahir dengan potensi yang berbeda-beda dan harus dikembangkan sebaik mungkin. Potensi itu berbentuk kemampuan-kemampuan yang masih belum terwujud yang memerlukan kesempatan dan lingkungan yang memungkinkan jalannya perkembangan yang lancar. Perkembangan yang lancar dan wajar menuju individu dewasa yang bertanggung jawab atas perbuatannya, hanya mungkin tercapai apabila perkembangan tersebut diberi bimbingan pula.⁴

³ Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, M.Quraish Shihab, Jakarta: Lentera Hati, 2002. Volume 14, hal. 326.

⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, Jakarta: Gunung Mulia, 2004, cet. Ke-13. hlm.112.

Meningkatkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin merupakan salah satu tujuan dari program keluarga harapan, penyuluhan keliling yang dilakukan penyuluh sosial mempertegas akan pentingnya pendidikan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

Dengan uraian ini penulis mencoba menggambarkan Program Keluarga Harapan, yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Peran Penyuluh Sosial Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung**”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, penulis difokuskan dalam Peran Penyuluh Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Partisipasi Belajar Anak Rumah Tangga Miskin di Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung. pentingnya pendidikan dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Bentuk Penyuluhan Keliling Pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang?
- b. Bagaimana Peran Penyuluh Sosial dalam mewujudkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin di Kelurahan Cipinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan penyuluhan terhadap rumah tangga miskin di kel. Cipinang, adapun tujuan secara khusus, antara lain:

- a. Untuk mengetahui Bentuk Penyuluhan Keliling Pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang.
- b. Untuk mengetahui Peran Penyuluh Sosial dalam mewujudkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin di Kelurahan Cipinang.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian yaitu:

- a. Manfaat Akademis, Dengan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan Referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.

Serta memberikan pengetahuan yang lebih tentang peran penyuluh dalam program keluarga Harapan pada Kementerian Sosial.

- b. Ilmu Pengetahuan, di harapkan penelitian ini dapat menahbah pengetahuan baru pada Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
- c. Kementerian Sosial, Bahan masukan (*input*) bagi Kementerian Sosial dalam pelaksanaan penyuluhan keliling pada Program Keluarga Harapan.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena sangat menentukan sukses atau tidaknya suatu penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data di dalam penelitiannya. Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed Research*) yaitu melakukan penelitian langsung dengan mengikuti penyuluhan keliling, untuk memperoleh data dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵

2. Subjek dan objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyeknya Ibu-ibu para peserta program keluarga harapan yang memiliki anak yang mendapat bantuan pada program keluarga harapan di Kelurahan Cipinang Jakarta Timur. peneliti mewancarai 7 ibu-ibu peserta Program keluarga harapan yang diambil secara acak, dengan mewancarai peserta program keluarga harapan di RT maupun RW yang berbeda. Sedangkan obyek penelitian adalah penyuluh pada program keluarga harapan di Kelurahan Cipinang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dengan permasalahan penelitian dan data-data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu aktifitas pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan

⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007) Hal 4

menggunakan alat indera.⁶ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengikuti penyuluhan sosial yang diselenggarakan pusat penyuluh sosial kementerian sosial dan berinteraksi langsung dengan ibu-ibu PKH, untuk memperoleh informasi sehingga data penelitian didapatkan.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dan orang yang diwawancarai itu mengemukakan isi hatinya, pandangan-pandangannya, pendapatnya dan lain-lain sedemikian rupa sehingga pewawancara dapat lebih mengenalnya.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara yang dijadikan acuan pada saat wawancara berlangsung. Selain itu, peneliti juga menggunakan *recorder* untuk merekam hasil-hasil yang diperlukan dan juga mencatat informasi yang didapat ketika di lapangan. Peneliti menentukan 12 informan untuk diwawancarai terdiri dari 7 orang ibu-ibu peserta Program Keluarga Harapan, 4 orang dari

⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1996). Hal 145.

penyuluh sosial, 1 orang kepala seksi pengembangan sosial Kementerian Sosial.

c. Dokumentasi

Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu program keluarga harapan di Kelurahan Cipinang yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik analisa Data

Yang dimaksud dengan teknik analisa data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁷ Menurut Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Lexy J Moleong mengemukakan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi bahan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.⁸

Pada tahap akhir, data yang telah dianalisa khususnya yang berisi jawaban atas tujuan penelitian diuraikan secara lebih jelas dan ringkas

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1995), Cet-1. H. 263.

⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

hingga mendapatkan kesimpulan mengenai peran penyuluh dalam meningkatkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu dari data yang terkumpul kemudian dijabarkan dengan memberi interpretasi untuk kemudian diambil kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran, kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.

5. Teknik penulisan

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan teknik penulisan yang didasarkan pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi” yang diterbitkan oleh CeQDA(*center for quality Development and Assurance*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Ada beberapa skripsi yang telah meneliti peran pembimbing agama terhadap anak dalam pembinaan akhlak maupun pengembangan konsep diri diantaranya yaitu:

1. **Metode Bimbingan Agama Bagi Anak Usia 7-12 Tahun Pada Keluarga Di Perumahan Vila Indah Permai Bekasi Utara** oleh Nonik

Muzayanah mahasiswi jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2004.⁹ hasil penelitiannya adalah metode bimbingan agama terhadap anak usia 7-12 tahun dalam penerapan nilai-nilai agama dan mengarahkan mereka pada perilaku yang baik dan bertakwa kepada Allah SWT. Melatih anak untuk disiplin untuk sholat tepat waktu yang di dampingi orang tua. Menggunakan media bacaan maupun tayangan televisi yang menyajikan kisah-kisah teladan yang menyangkut dengan akhlak.

2. **Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Di Graha Husada Bhakti (GHB)**

Ciledug Indah Tangerang.¹⁰ Oleh Risky Sukma Jayanti mahasiswi Bimbingan dan Penyuluhan Islam tahun 2006. teknik atau langkah yang digunakan sesuai dengan bimbingan keluarga di graha Husada Bhakti pada umumnya sama dengan yang lainnya. Teknik ini terlihat beberapa tahapan dalam proses yakni tahapan pembuka, pengidentifikasian masalah, analisis data sampai terbentuknya pemecahan masalah. Tahapan dalam teknik ini dilakukan pembimbing dengan melakukan pendekatan yakni pendekatan secara jiwa, pendekatan dalam bentuk rasa, pendekatan dengan ketulusan, pendekatan dengan kejujuran, pendekatan secara keakraban, penafsiran ayat Al-quran dan metode langsung.

3. Disusun oleh Zahrotun skripsi mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Berjudul **Metode bimbingan orang tua dalam**

⁹Di susun oleh nonik Muzayanah “*Metode Bimbingan Agama Bagi Anak Usia 7-12 Tahun Pada Keluarga Di Perumahan Vila Indah Permai Bekasi Utara*”, (skripsi Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, 2010).

¹⁰ Di susun oleh Risky Sukma Jayanti “*Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Di Graha Husada Bhakti (GHB) Ciledug Indah Tangerang*”. (skripsi Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi, 2011).

pelaksanaan ibadah shalat anak di Kampung Kapuk Lebak Bulus Jakarta Selatan.¹¹ Dari hasil penelitian ini (Zahrotun) mengungkapkan beberapa temuannya diantaranya bentuk bimbingan yang dilakukan orang tua dalam pelaksanaan ibadah shalat ada dua bentuk yaitu, bimbingan teori dan bimbingan praktek. Dengan menggunakan dua bentuk ini orang tua mengharapkan agar anak dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Kemudian pada dasarnya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah, dengan selalu taat pada agamanya dan melaksanakan perintahnya. Dan dalam menerapkan metode bimbingan dalam pelaksanaan ibadah shalat, sebagian besar orang tua menggunakan metode *directive*, yaitu mengarahkan dan memberikan pemahaman yang berhubungan dengan ibadah shalat agar anak mereka selalu melaksanakan ibadah shalat dengan baik dan benar tanpa merasa terpaksa untuk melaksanakannya.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan gambaran secara ringkas tentang susunan penulisan ini. Untuk memudahkan arah pembahasan maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

¹¹ Di susun oleh Zahrotun “*Metode Bimbingan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat Anak di Kampung Kapuk Lebak Bulus Jakarta Selatan*”, (Skripsi, Fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi,2007)

Memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS

Terdiri dari Pengertian Peran, Pengertian Penyuluhan, Penyuluhan sosial, Prinsip dasar Penyuluhan. Pengertian Partisipasi, Bentuk - Bentuk Partisipasi dan Prinsip-prinsip partisipasi. Pengertian rumah tangga miskin, Penyebab kemiskinan dan Ciri-ciri masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Gambaran Umum Program Keluarga Harapan pada kementerian sosial, Terdiri atas; sejarah berdiri dan perkembangannya, Tujuan umum dan Tujuan Khusus dari Program Keluarga Harapan, Rubrikasi Program Keluarga Harapan

BAB IV HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan penyuluhan keliling pada Program Keluarga Harapan, Peran Penyuluh Sosial dalam mewujudkan partisipasi belajar anak rumah tangga

miskin pada program keluarga harapan dan Analisis Peran.

BAB V

PENUTUP

Meliputi uraian kesimpulan dan saran.



BAB II

Landasan Teoritis

A. Peran dan Penyuluhan

1. Definisi Peran

Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.¹ Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peran karena dia orang yang mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain tersebut, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya.

Sedangkan menurut Grass Massan sebagaimana dikutip David Berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenalkan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.² Harapan tersebut, menurut David Berry, merupakan hubungan dari norma-norma sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan peranan-peranan ini ditentukan oleh norma-norma di masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan lainnya.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam teorinya Biddle & Thomas

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1998), hal.667

² David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, cet. Ke-3, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1995),hal.99

membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut³

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

Dalam penjelasan tersebut diatas terlihat suatu gambaran bahwa yang dimaksud dengan peran merupakan kewajiban dan keharusan yang dilakukan seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu pada suatu masyarakat.

2. Definisi Penyuluhan

Pengertian penyuluh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberipenerangan; petunjuk jalan.⁴ Clear et al, (1984) berpendapat bahwa penyuluhan adalah merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (*problem solving*) yang berorientasi pada tindakan; yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (*regulating*) dan juga tidak melaksanakan program yang non-edukatif.⁵

Menurut James F. adam penyuluhan adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu dimana seseorang membantu yang lain, supaya ia dapat

³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Soaial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet ke VII, hal,215

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, hal.1100.

⁵ Zulkarimein Nasution, *Prinsip-Prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan*, (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990) hal, 7.

lebih baik memahami dirinya, dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidup yang dihadapi pada waktu itu dan waktu yang akan datang.⁶ Dari beberapa pengertian tersebut penulis mendefinisikan penyuluh sebagai suatu kegiatan mendidihkan sesuatu kepada masyarakat, member mereka pengetahuan, informasi-informasi, dan kemampuan-kemampuan baru, agar mereka dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya

B. Penyuluhan sosial

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada khalayak sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemaun guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.⁷

Kegiatan penyuluhan sosial diperlukan sebagai gerak awal memiliki tujuan disamping sebagai salah satu tahapan pengkondisian masyarakat, juga untuk meminimalisir terjadinya resiko kesenjangan sosial dalam masyarakat antara yang menerima bantuan langsung dengan yang tidak menerima bantuan. Penyuluhan sosial dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman seluruh *stakeholder* yaitu pemerintah dan masyarakat dan untuk tahu, mau dan bisa berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

⁷ Buku Pedoman pelaksanaan Penyuluhan Sosial di daerah Rawan Sosial Perdesaan dan Perkotaan, Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2011

Teknik Penyuluhan Sosial

1. Berbicara/berkomunikasi, yaitu kemampuan seorang penyuluh berbicara dengan baik di depan umum dan mampu mengkomunikasikan materi yang disampaikan kepada kelompok sasaran sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Seorang penyuluhan harus mampu menampilkan figur seorang narator dan dapat mempengaruhi kelompok sasaran.
2. Memotivasi, yaitu kemampuan memberikan dorongan dan mempengaruhi semangat dan kemaunan kelompok sasaran sehingga mau melaksanakan apa yang disampaikan.
3. Penyajian Materi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan dan mengemas materi secara sistematis sehingga menjadi jelas dan menarik bagi kelompok sasaran.
4. Pemilihan dan penggunaan alat bantu, yaitu kemampuan untuk dapat menentukan dan memanfaatkan atau menggunakan alat bantu penyuluhan yang sehingga dapat mendukung penyampaian materi yang disajikan, seperti, infocus, alat peraga, gambar dan lain-lain.
5. *Timing*, yaitu kemampuan untuk mengatur atau menyusun jadwal serta mengatur waktu pelaksanaan penyuluhan sehingga penyampaian materi keseluruhan dapat terlaksana dan kelompok sasaran tidak merasa bosan.
6. *Focus* yaitu kemampuan untuk memusatkan materi penyuluhan sehingga terkait dengan permasalahan yang sesungguhnya.

7. *Diferensia*, yaitu kemampuan untuk menganalisis masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda sehingga seorang penyuluh memiliki pemahaman yang luas dan objektif terhadap masalah tersebut, bukan pemahaman yang sempit dalam melihat masalah tersebut.
8. *Partialization*, yaitu kemampuan untuk memilih-milah masalah sehingga mudah dipahami menjelaskan dan mudah memahami. Ini penting dilakukan oleh seorang penyuluh sehingga kelompok sasaran mudah menangkap apa pesan yg sesungguhnya, bagaimana melakukannya tetapi tidak menjadi membingungkan.
9. *Evaluasi*, yaitu kemampuan untuk menilai sejauh mana keberhasilan penyuluhan yang sudah dilakukan. Apakah kelompok sasaran dapat memahami, mengerti dan menangkap makna sesungguhnya yang disampaikan.
10. *Negosiasi*, yaitu kemampuan untuk melakukan loby atau transaksi dengan berbagai pihak yg terkait dengan penyuluhan dalam rangka mewujudkan suatu maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai.
11. *Orator*, yaitu kemampuan utk berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukanlah suatu hal yang mudah bagi seorang yang belum berpengalaman.
12. *Need Assessment*, yaitu kemampuan untuk memahami dan menganalisis kebutuhan kelompok sasaran untuk dijadikan sebagai bahan materi dalam proses penyuluhan. Kemampuan seperti ini perlu dilakukan sehingga apa yang kita sampaikan dan bicarakan dapat berkaitan langsung dengan

permasalahan dan kebutuhan masyarakat tersebut, dan solusinya dapat ditemukan.

13. Perencanaan Penyuluhan, yaitu kemampuan untuk menyusun atau mengatur kegiatan penyuluhan sehingga dapat berjalan lancar. Kadang-kadang ada orang menganggap bahwa perencanaan penyuluhan merupakan hal yg gampang dan tidak perlu dipersiapkan. Namun, kenyataan perencanaan penyuluhan adalah sulit.⁸

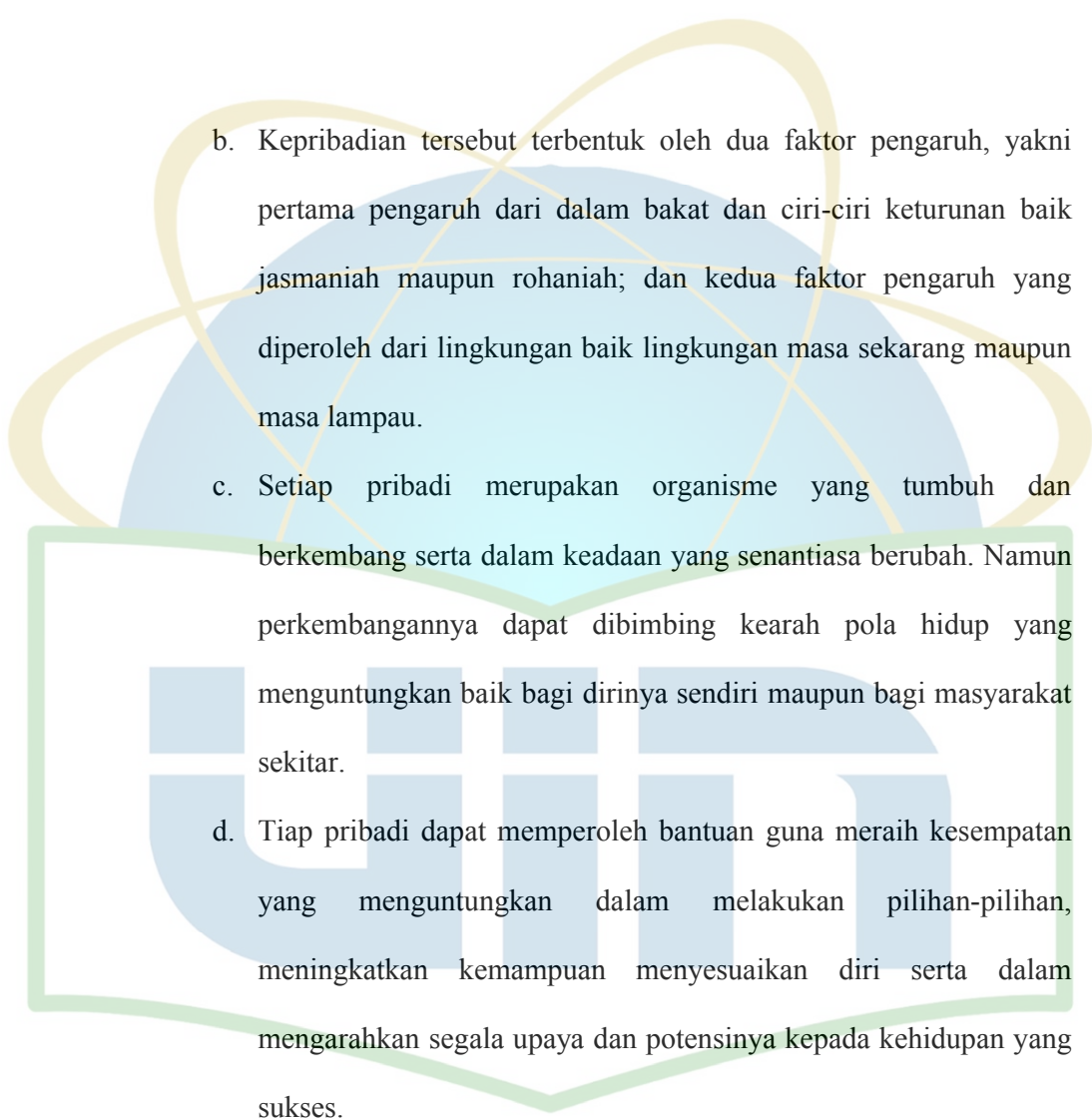
Penulis berpendapat, apapun bentuk yang telah dilakukan para penyuluh sosial, paling tidak semangat menjadi penyuluh sosial itulah yang layak diberikan apresiasi dan dijadikan teladan. Penyuluh Sosial sangatlah perlu, karena itu penyuluh sosial harus mengutamakan pola yang partisipatif dan dialogis, dimana harus ada hubungan timbal balik antar keduanya, dan penyuluh sosial sebagai agen perubahan harus menempatkan diri dalam kehidupan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, para penyuluh agama hendaknya memahami dan memperhatikan beberapa prinsip dasar penyuluhan. Dalam kaitannya ini, Leslie E. Moser dan Ruth Small Moser merumuskan beberapa prinsip sebagaimana dikemukakan dibawah ini:⁹

- a. Setiap pribadi adalah makhluk yang dinamis dan masing-masing memiliki kelainan kepribadian, kemungkinan berkembang dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

⁸ Buku pedoman Pelaksanaan Penyuluhan Sosial di Daerah Rawan Sosial dan Perkotaan, Pusat Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial. 2011, hlm 55.

⁹ Leslie E. Moser dan Ruth Small Moser, *counseling and guidances: An Exploration*, prentice Hall inc., Englewood Cliffs, New York, 1963, hal. 9.

- 
- b. Kepribadian tersebut terbentuk oleh dua faktor pengaruh, yakni pertama pengaruh dari dalam bakat dan ciri-ciri keturunan baik jasmaniah maupun rohaniah; dan kedua faktor pengaruh yang diperoleh dari lingkungan baik lingkungan masa sekarang maupun masa lampau.
- c. Setiap pribadi merupakan organisme yang tumbuh dan berkembang serta dalam keadaan yang senantiasa berubah. Namun perkembangannya dapat dibimbing kearah pola hidup yang menguntungkan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat sekitar.
- d. Tiap pribadi dapat memperoleh bantuan guna meraih kesempatan yang menguntungkan dalam melakukan pilihan-pilihan, meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri serta dalam mengarahkan segala upaya dan potensinya kepada kehidupan yang sukses.
- e. Dengan adanya kepribadian setiap anggota masyarakat yang terus berkembang serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, maka masyarakat sendiri memperoleh kemajuan.
- f. Setiap pribadi hendaknya diberi hak, kesempatan dan kemampuan yang sama dalam mengembangkan pribadinya masing-masing tanpa memandang perbedaan suku bangsa, anggama, ideologi dan lain-lain.

g. Setiap pribadi memiliki potensi jiwa beragama secara alamiah yang dapat berkembang dengan baik apabila dibimbing dengan baik pula. Karena perkembangannya sangat bergantung kepada usaha pendidikan. Jika perkembangan jiwa keagamaannya tidak sesuai dengan potensi alamiahnya di atas, kiranya dapat dinyatakan bahwa sebab utamanya adalah tidak memiliki kesempatan yang baik untuk berkembang.

h. Perkembangan dan pertumbuhan setiap pribadi bersifat menyeluruh, yakni jiwa dan raganya menuju kepada kedewasaan yang penuh.

Pelaksanaan penyuluhan sosial merupakan kegiatan strategis dalam rangka membangun dan meningkatkan kesedaran masyarakat, yang pelaksanaannya memerlukan keterpaduan dan sinergitas dengan berbagai macam program lainnya.

C. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi.

Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta¹⁰. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga, Balai pustaka Jakarta 2007

Partisipasi warga adalah proses ketika individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹ Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil ada empat poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

¹¹ Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003. hal.17

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.¹²

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek

¹² Holil Soelaiman. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. 1980 Bandung.. hal.10

tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.¹³

Unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

1. Kepercayaan diri masyarakat;
2. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
3. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat;
4. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri;
5. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
6. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat;
7. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
8. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
9. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

¹³ Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. UGM Press. 1991 Yogyakarta. Hal. 154-155.

3. Bentuk - Bentuk Partisipasi.

Menurut Effendi, partisipasi ada dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

- Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan mana masyarakat berada sebagai posisi bawahan.
- Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakatnya tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota / kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.¹⁴

¹⁴ Wikipedia "Partisipasi" diakses pada tanggal 3 Maret 2012 dari <http://id.wikipedia.org>.

Tabel 1

Model Partisipasi

Tipologi	Karakteristik
Partisipasi pasif/ manipulatif	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi.</p> <p>(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek, tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.</p> <p>(c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.</p>
Partisipasi dengan cara memberikan informasi	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya.</p> <p>(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan memengaruhi proses penyelesaian.</p> <p>(c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.</p>
Partisipasi melalui konsultasi	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi.</p> <p>(b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat.</p> <p>(c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama.</p> <p>(d) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindak lanjuti.</p>
Partisipasi untuk insentif materil	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya.</p> <p>(b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya.</p> <p>(c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.</p>
Partisipasi fungsional	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek.</p> <p>(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati.</p> <p>(c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.</p>

Partisipasi interaktif	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada.</p> <p>(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis.</p> <p>(c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.</p>
Self mobilization	<p>(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki.</p> <p>(b) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan.</p> <p>(c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.</p>

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan dan Rumah Tangga Miskin.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Scott (1979) berpendapat bahwa kemiskinan dapat didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan nonmateri yang diterima oleh seseorang. Kemiskinan, pertama-tama, dapat diartikan sebagai kondisi yang diserita manusia karena kekurangan atau tidak memiliki pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidupnya, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua kemiskinan didefinisikan dari segi kurang atau tidak memiliki asset, seperti tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit, dan lain-lain.¹⁵

Rumah tangga miskin adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terkait oleh pertalian daerah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga Luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin.¹⁶

2. Penyebab kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:¹⁷

- penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
- penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
- penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
- penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;

¹⁵ Ekspresi seni orang miskin: *Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan*, Nuansa. Oktober 2000, hlm 24.

¹⁶ *Kemiskinan dan keberfungsian sosial* studi kasus rumah tangga miskin di Indonesia STKS Sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung bandung Press 2003.

¹⁷Wikipedia, *Kemiskinan* diakses pada tanggal 12 september 2012 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>.

- penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Ada beberapa penyebab kemiskinan peserta program keluarga harapan di Kelurahan cipinang diantaranya berpendidikan atau berketerampilan rendah dan tidak berketerampilan sama sekali, dengan upah yang rendah dan tanpa kemungkinan mendapat kedudukan yang lebih baik, mereka itu sebagian besar bekerja pada perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa kecil-kecilan atau sebagai pembantu rumah tangga, buruh bangunan, kuli angkut dan muat barang, atau sebagai buruh harian lainnya yang tidak memerlukan keterampilan. Termasuk juga mereka yang hidup pas-pasan sebagai penjual barang bekas.

3. Ciri-ciri masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Emil salim (1984) mengemukakan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa cirri-ciri sebagai berikut.¹⁸

- Pertama, mereka tidak memiliki factor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan, seperti adanya jaminan

¹⁸ Kegiatan lembaga swadaya masyarakat memberdayakan kaum miskin dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus jawa tengah)Tesis Merphin Panjaitan, program pengkajian ketahanan nasional, 1997, hlm 42-44.

kredit terpaksa berpaling pada “lintah darat” yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang tinggi.

- Ketiga, tingkat pendidikan mereka rendah, tak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Juga anak-anak mereka tidak bias menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka hidup dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini.
- Keempat, kebanyakan mereka tinggal di pedesaan. Banyak di antara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada maka kecil sekali. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja dengan musiman maka kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka menjadi pekerja bebas (*self employed*) berusaha apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka tingkat upah menjadi rendah, sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa banyak di antara mereka mencoba berusaha di kota (urbanisasi).
- Kelima, banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (*skill*) atau pendidikan. Sedangkan kota banyak Negara berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa ini. Apabila di Negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di Negara

berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industry pendidikan ataupun keterampilan, maka keadaan mereka di kota dan di desa menjadi buruk, tanpa harapan untuk keluar dari bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:¹⁹

- Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
- Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

¹⁹ Wikipedia, Kemiskinan, diakses pada tanggal 12 september 2012 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>.

BAB III

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Program Keluarga Harapan

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang saat ini dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin terutama dengan kemiskinan kronis.¹

PKH merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Dengan PKH diharapkan RTSM Peserta PKH memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu: kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. Peserta PKH memiliki berbagai

¹ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 1, 2011.

kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan. Kewajiban kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita, kewajiban pendidikan berkaitan dengan menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan(SD s.d SLTP).

Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf c menyatakan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” dan huruf d menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.² Oleh karenanya, dengan mensyaratkan keluarga peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan (seperti: imunisasi bayi, pemeriksaan kandungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan,) dan pendidikan (seperti: menyekolahkan anak sampai minimal lulus sekolah setara SMP), diharapkan PKH akan merubah kebiasaan RTSM ke arah perbaikan kualitas SDM sehingga dalam jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

² PUTUSAN NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA diakses pada tanggal 12 september 2012 dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20Perkara%20No.11-14-21-126%20-136PUU-VII-2009.pdf>.

B. Komponen pendidikan dalam PKH

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 tahun),³ khususnya bagi anak-anak RTSM, dan untuk mengurangi angka pekerja anak.

Persyaratan yang ditetapkan untuk komponen pendidikan dalam PKH adalah mendaftarkan peserta didik (*Enrollment*) dan memenuhi jumlah kehadiran (*Attendance*) yang ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar, diharapkan PKH akan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Dan hal ini mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia tentang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dengan persyaratan kehadiran minimal 85%, diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. Hal ini tentunya harus didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, ketersediaan tenaga pendidik yang handal, dan lain-lain.⁴

Tersedianya fasilitas dan pelayanan pendidikan (seperti sekolah satu atap SD dan SMP, sarana belajar, buku-buku dan tenaga pendidik) yang memadai merupakan syarat utama yang harus dipenuhi untuk mensukseskan tujuan pelaksanaan PKH, komponen pendidikan. Ketersediaan tenaga pendidik (guru, pamong, tutor, dll) yang kompeten bukan hanya diperlukan dalam memberikan

³ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 21, 2011.

⁴ Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 5, 2007.

pengajaran saja, mereka juga dituntut harus berkontribusi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan PKH komponen pendidikan, yaitu melalui keterlibatannya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas serta melakukan verifikasi komitmen kehadiran anak-anak peserta PKH di kelas.

Untuk menjamin pelaksanaan komponen pendidikan sejalan dengan tujuan PKH yang hendak dicapai, diperlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan program. Untuk maksud inilah buku “Pedoman Operasional PKH bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan” ini disusun.

C. PKH dan KEMISKINAN

Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH yaitu (i) pendidikan dan (ii) kesehatan. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh (Ruger et al. 2001). Kesehatan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara, misalnya kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil, bantuan persalinan, pelayanan tumbuh kembang bayi dan balita, dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Terganggunya kesehatan dapat berdampak pada pengurangan penghasilan keluarga, misalnya jika pencari nafkah keluarga dalam keadaan sakit, mereka tidak bisa bekerja, sehingga berakibat terhadap hilangnya penghasilan. Jika sektor kesehatan dan/atau pendidikan terganggu, maka akan mengakibatkan terganggunya tingkat pendapatan suatu rumah tangga sehingga mereka bisa menjadi miskin.

Di samping itu, fakta empiris memperlihatkan kesenjangan dalam bidang ekonomi menjadi pemicu bagi kesenjangan dalam partisipasi pendidikan. Oleh karena itu, fakta ini menjadi dasar petunjuk yang jelas, bahwa sasaran layanan pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan terutama bagi kelompok masyarakat kurang mampu.⁵ Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf c menyatakan, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” dan huruf d menyatakan “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.”⁶

Oleh karenanya, dengan mensyaratkan keluarga peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan (seperti: imunisasi bayi, pemeriksaan kandungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dll) dan pendidikan (seperti: menyekolahkan anak sampai minimal lulus sekolah setara SMP), diharapkan PKH akan merubah kebiasaan RTSM ke arah perbaikan

⁵ Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 2, 2011.

⁶ PUTUSAN NOMOR 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA diakses pada tanggal 12 september 2012 dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20Perkara%20No.11-14-21-126%20-136PUU-VII-2009.pdf>.

kualitas SDM sehingga dalam jangka panjang program ini akan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.⁷

D. Kewajiban Peserta PKH

Untuk bisa menerima hak (yaitu menerima bantuan tunai seperti dijelaskan di atas), peserta PKH diharuskan memenuhi kewajiban atau komitmen yang ditetapkan. Kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menghadiri Pertemuan Awal

Sebelum bantuan tunai tahap pertama dibayarkan, pertemuan awal dikoordinasikan oleh pendamping UPPKH kecamatan dan diselenggarakan di lokasi terdekat dengan domisili RTSM. Seluruh calon peserta PKH terpilih (ibu/perempuan dewasa) diwajibkan menghadiri acara pertemuan tersebut. Kantor UPPKH Kecamatan juga akan mengundang Kantor Kemenag Kab/Kota, Kantor Dinas Pendidikan Kab/Kota, Camat, Lurah/Kepala desa, perwakilan dari satuan pendidikan, Puskesmas dan tokoh masyarakat untuk menghadiri acara pertemuan tersebut. Tujuan pertemuan awal adalah untuk:

- Menginformasikan tujuan, tingkat bantuan, mekanisme dan lainnya mengenai PKH serta membagikan bahan-bahan program (buku saku peserta PKH);

⁷ Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan Bagi Para Pemberi Pelayanan Pendidikan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Hal 2, 2011.

- Menjelaskan hak dan kewajiban ibu peserta PKH;
- Menjelaskan komitmen yang harus dilakukan oleh calon peserta PKH untuk dapat menerima bantuan;
- Menjelaskan sanksi dan konsekuensinya apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen yang ditetapkan dalam program;
- Menjelaskan perlunya melakukan pendaftaran ke sekolah/satuan pendidikan bagi anak-anak yang belum terdaftar, khusus peserta PKH Pendidikan;
- Menjelaskan perlunya melakukan kunjungan awal ke Puskesmas untuk menetapkan jadwal kunjungan bagi setiap anggota keluarga peserta PKH kesehatan;
- Membantu peserta PKH mengisi Formulir validasi data (perbaiki data pribadi peserta);
- Mengumpulkan semua Formulir Validasi data yang sudah diisi dan Perjanjian Kesiediaan Peserta PKH untuk mengikuti komitmen PKH yang sudah ditandatangani oleh peserta dan pendamping PKH.;
- Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH;
- Memfasilitasi pembentukan kelompok peserta PKH dan memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok;
- Menjelaskan kewajiban Ketua Kelompok dalam PKH

2. Mendaftarkan Anak ke Satuan Pendidikan

Setelah dilakukan pertemuan awal dan validasi oleh pendamping, peserta PKH harus mendaftarkan kembali anggota rumah tangga ke satuan pendidikan apabila ditemukan:⁸

1. Anak usia sekolah (7-15 tahun) belum terdaftar di sekolah, maka ibu/perempuan dewasa peserta PKH harus segera mendaftarkan anak tersebut ke sekolah SD/SDLB/MI/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/SMPLB/MTs/Salafiyah Wustha/SMP Terbuka/Paket B atau satuan pendidikan setara SD atau SMP.
2. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau buta aksara, maka Ibu dari RTSM peserta PKH harus mendaftarkan anak tersebut ke sekolah terdekat atau satuan pendidikan non-formal (seperti misalnya, keaksaraan fungsional, Paket A setara SD atau Paket B setara SMP atau pesantren salafiyah setara SD/SMP).
3. Anak usia 7-15 tahun dan usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan diketahui bahwa mereka bekerja baik di sektor formal maupun informal, maka Ibu dari RTSM peserta PKH dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah/satuan pendidikan atau mengikutkan anak tersebut ke dalam program persiapan pendidikan seperti: rumah singgah, rumah perlindungan sosial anak (RPSA), panti sosial asuhan

⁸ Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 11, 2011.

anak, dll. Selanjutnya apabila anak-anak tersebut telah siap untuk belajar, mereka harus didaftarkan kembali ke satuan pendidikan formal maupun non-formal.

Ketika melakukan pendaftaran anak ke satuan pendidikan, Ibu RTSM akan didampingi oleh pendamping PKH dari kantor UPPKH Kecamatan. Informasi nama sekolah dan/atau nama penyelenggara pendidikan non-formal selanjutnya harus dilaporkan ke pendamping PKH untuk keperluan pelaksanaan program lebih lanjut.

3. Mematuhi Komitmen

Kewajiban peserta PKH selanjutnya adalah mematuhi komitmen atau persyaratan yang ditetapkan dalam program, yaitu:

1. Bagi peserta PKH dengan anak usia 7-15 tahun. Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun harus mendaftarkan anak tersebut di sekolah SD/SDLB/MI/Salafiyah Ula atau SMP/SMPLB/MTs/Salafiyah Wustha/SMP Terbuka atau pendidikan kesetaraan. Jika sudah terdaftar di satuan pendidikan, anak tersebut harus mengikuti kehadiran minimal 85 % hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung. Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi), apabila jumlah hari sekolah dalam satu bulan adalah 22-20 hari, jumlah maksimal ketidakhadiran anak di sekolah yang diperbolehkan adalah 3 hari. Pengecualian diberlakukan pada peserta didik yang absen karena sakit atau terjadinya bencana alam di daerah tersebut.

Jika absen karena sakit lebih dari 3 hari secara berturut-turut, peserta didik tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui. Selain itu, pengecualian juga diberlakukan pada saat masa libur sekolah, masa transisi dari SD/SDLB/MI Salafiyah Ula/Paket A, ke SMP/SMPLB/MTs. Salafiyah Wustha/Paket B.

Tabel 2 berikut ini merinci batas maksimal ketidakhadiran anak di satuan pendidikan menurut jumlah hari sekolah yang berlangsung dalam satu bulan berjalan.

Tabel 1. Jumlah Maksimal Ketidakhadiran Anak di Satuan Pendidikan

JUMLAH HARI SEKOLAH DALAM 1 BULAN	JUMLAH HARI MAKSIMAL KETIDAKHADIRAN DI SATUAN PENDIDIKAN
27 – 20 hari	3 hari
19 – 14 hari	2 hari
13 – 6 hari	1 hari

Sumber: Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan hal 14.

Untuk keperluan pembuktian tingkat kehadiran (verifikasi) bagi pendidikan kesetaraan, jumlah hari tatap muka dalam satu bulan harus memenuhi 85% tatap muka. Sebagai contoh, apabila tatap muka berjumlah 3 kali per minggu atau 12 kali perbulan, maka kehadiran harus memenuhi 10,2 hari atau dibulatkan menjadi 10 kali pertemuan. Hal ini juga berlaku pada kegiatan yang ada di panti sosial dan institusi serupa yang menangani pekerja anak atau mereka yang membutuhkan program penyesuaian kembali ke bangku sekolah.

2. Bagi peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas. Peserta PKH yang memiliki anak dengan kemampuan terbatas (tuna daksa, keterbelakangan mental, keterbatasan penyerapan dan sejenisnya) memiliki pengecualian dalam hal usia. Semua anak dari kelompok ini yang masih mengikuti pendidikan dasar tidak dibatasi rentang usianya, jika peserta didik tersebut dapat didaftarkan di sekolah khusus (seperti, SLB) maupun sekolah umum yang menyediakan program khusus. Komitmen yang harus dipenuhi tetap berbasis tingkat kehadiran 85%. Peraturan lain berlaku sebagaimana yang telah ditentukan pada sistem sekolah formal dan informal lainnya. Ringkasan hak dan kewajiban peserta PKH pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Ringkasan Hak dan Kewajiban Peserta PKH Pendidikan

Hak Peserta PKH Pendidikan	Kewajiban Peserta PKH Pendidikan
1. Memperoleh bantuan tunai	1. Menghadiri pertemuan awal untuk mengikuti sosialisasi program, perbaikan data peserta (jika ada), penandatanganan perjanjian komitmen, dll. 2. Mendaftarkan anak ke satuan pendidikan 3. Jika anak sudah terdaftar di satuan pendidikan, anak harus mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Sumber: Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan hal 15.

4. Sanksi Pelanggaran Komitmen

Bagi anak-anak RTSM yang tidak memenuhi komitmen kehadiran 85 % dari hari efektif belajar akan dikenakan sanksi melalui pengurangan bantuan . Penghitungannya dilakukan dalam satu kwartal, maka besaran bantuan yang akan diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 1 (satu) bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000,-
- b. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 2 (dua) bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100.000,-
- c. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 (tiga) bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150.000,-
- d. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 4 (empat) bulan berturut-turut maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.

Ketentuan diatas tidak berlaku bagi ketidakhadiran yang diakibatkan sakit, bencana alam, bencana sosial, tidak ada guru/pamong, dan tidak ada transportasi umum.⁹

5. Hak Peserta PKH dalam Bidang Pendidikan.

RTSM yang terpilih sebagai peserta PKH berhak memperoleh bantuan uang tunai apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran bantuan tunai untuk komponen pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang diduduki oleh anak. Rincian besaran bantuan komponen pendidikan disajikan pada Tabel berikut ini.

⁹ Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan Bagi Para Pemberi Pelayanan Pendidikan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI Hal 10, 2011.

Tabel 3. Skenario Bantuan PKH Pendidikan

Skenario Bantuan	Besar Bantuan per RTSM per Tahun
Bantuan tetap	Rp. 200.000
Bantuan bagi RTSM yang memiliki: Anak usia di bawah 6 tahun, Ibu hamil/ menyusui	Rp. 800.000
Anak peserta pendidikan setara SD/MI	Rp. 400.000
Anak peserta pendidikan setara SMP/Mts	Rp. 800.000
Rata-rata bantuan per RTSM	Rp. 1.390.000
Bantuan minimum per RTSM	Rp. 600.000
Bantuan maksimum per RTSM	Rp. 2.200.000

Sumber: *Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* hal 22.

Bantuan tunai akan dibayarkan kepada peserta setiap empat bulan melalui kantor Pos terdekat. Bantuan tunai diterima langsung oleh ibu RTSM atau perempuan yang mengasuh anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15 s.d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar:¹⁰

- Untuk tahap pertama, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika peserta PKH (Ibu/perempuan dewasa) telah menghadiri acara pertemuan awal yang dikoordinasikan oleh UPPKH Kecamatan dan anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah terdaftar di satuan pendidikan yang telah ditetapkan.
- Untuk tahap berikutnya, bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dari keluarga peserta PKH sudah memenuhi komitmen pendidikan yang ditetapkan yakni kehadiran minimal 85% di kelas/kelompok belajar.

¹⁰ Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, hal 17, 2011.

- Sebagai bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru/tutor) dan diketahui oleh Kepala sekolah/Ketua penyelenggara satuan pendidikan. Proses verifikasi pendidikan disajikan pada bab III di dalam buku ini dan formulir verifikasi dapat dilihat pada lampiran buku ini.
- Kepada anak-anak penerima bantuan PKH yang terdaftar di sekolah Formal, tetap berhak menerima bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Pemberian Beasiswa bagi Siswa Miskin, tahun 2009) dan bantuan Beasiswa Khusus dari Departemen Agama (Pedoman Bantuan Beasiswa Prestasi, tahun 2008).

6. Peran Pemberi Pelayanan Pendidikan

Lembaga pendidikan tersebut diatas memiliki peranan penting untuk mensukseskan pencapaian tujuan PKH pendidikan. Peran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Menerima Pendaftaran Anak Peserta PKH di Satuan Pendidikan

Setiap satuan pendidikan diharuskan menerima anak peserta PKH yang mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku, dan dibebaskan dari segala bentuk biaya pendidikan.

b. Memberikan Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, institusi penyelenggara satuan pendidikan berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh peserta didik yang terdaftar. Penyelenggara satuan pendidikan harus memberikan pengajaran kepada peserta didik termasuk anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH pendidikan. Pengajaran harus mengacu kepada kurikulum yang berlaku untuk setiap jenjang dan jalur pendidikan.

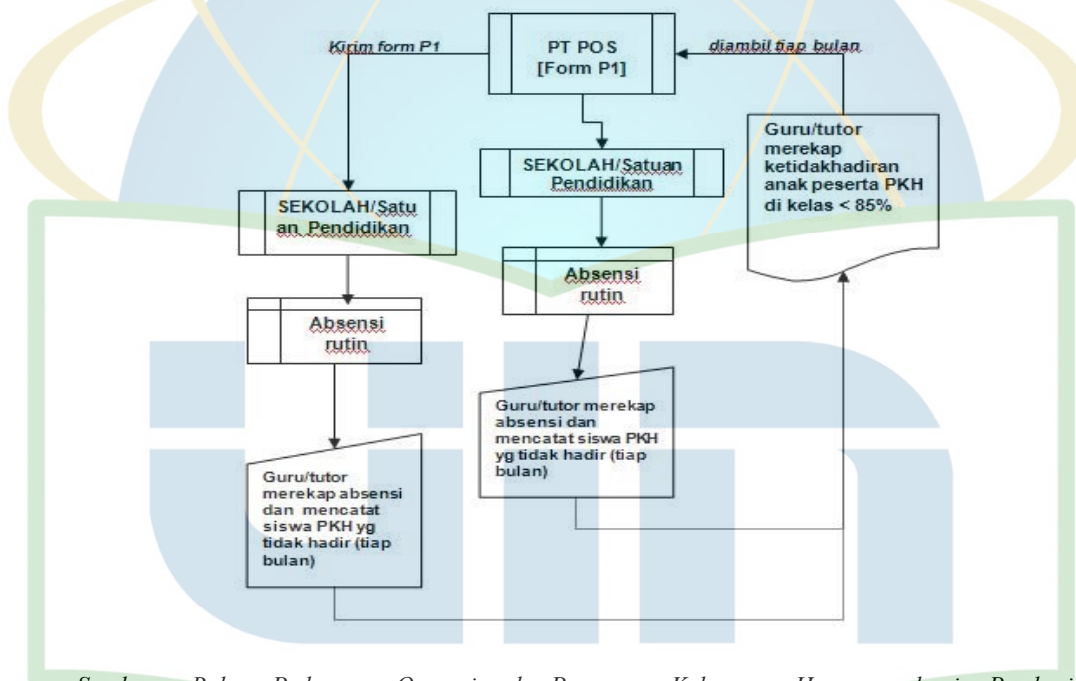
c. Melakukan Verifikasi Komitmen Peserta PKH Pendidikan

Seperti dijelaskan pada bab II buku ini bahwa bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan terus diberikan bagi peserta PKH jika anak-anak dari keluarga penerima bantuan PKH memenuhi komitmennya yaitu: menghadiri dan mengikuti proses pembelajaran minimal 85 % hari efektif sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun pelajaran berlangsung.

Tingkat kehadiran peserta didik harus diverifikasi oleh para tenaga pendidik di lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Prosedur verifikasinya adalah sebagai berikut (Gambar 1) :

Gambar 1.

Alur Proses Verifikasi Program Keluarga Harapan



Sumber: Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan bagi Pemberi Pelayanan pendidikan hal 26.

Keterangan :

1. Lembaga pendidikan akan menerima formulir verifikasi P1 (terlampir) dari PT Pos setiap awal bulan dan akan diambil kembali oleh PT. Pos akhir bulan.
2. Sesuai aturan yang berlaku di sekolah, tenaga pendidik melakukan absensi kehadiran peserta didik di tiap-tiap kelas/kelompok belajar.

3. Untuk keperluan verifikasi komitmen peserta PKH, tenaga pendidik harus merekap absensi kehadiran peserta didik di kelas/kelompok belajar selama satu bulan berjalan (tindak lanjut tahap 2 diatas). Selanjutnya *tenaga pendidik* mencatat nama peserta didik peserta PKH yang tidak hadir/tidak memenuhi komitmen kehadiran yang telah ditentukan yaitu setidaknya 85 % dari jumlah hari efektif sekolah atau ketentuan tatap muka yang berlaku setiap bulannya (lihat tabel 2). Pencatatan dilakukan dengan mengisi jumlah ketidakhadiran dan alasan ketidakhadiran. Formulir verifikasi P1 hanya diisi untuk peserta didik yang tidak memenuhi komitmen kehadirannya.
4. Formulir verifikasi P1 yang telah diisi/diperiksa oleh tenaga pendidik (Sekolah SD/SDLB/MI/ SMP/SMPLB/MTs/SMP Terbuka, pesantren salafiyah, kembaga pendidikan non formal lainnya), dan diketahui oleh Kepala Sekolah/Pengelola, setiap bulan akan diambil oleh petugas pos untuk disampaikan ke UPPKH Kab/kota dan selanjutnya diproses oleh bagian SIM.

Tanggung Jawab Pimpinan Lembaga Pendidikan

1. Pimpinan satuan lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PKH di setiap satuan pendidikan.
2. Pimpinan satuan lembaga pendidikan juga harus menjamin agar semua peran tersebut di atas dapat dijalankan dengan optimal.

Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan PKH Terdiri dari:

a. Lembaga Pendidikan Formal

- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- Madrasah Ibtidaiyah (MI)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
- SMP Terbuka
- Madrasah Tsanawiah (MTs)
- Pesantren Salafiyah

BAB IV

HASIL DAN ANALISA PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyuluhan Keliling pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang.

Penyuluhan keliling pada program keluarga harapan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2011 di Aula lantai empat Kantor Kelurahan Cipinang

Penyuluhan Yang diawali dengan pembukaan dan perkenalan peserta Penerima bantuan yang di hadiri kurang lebih 116 peserta.¹ “Cerdas dan sehat demi masa depan” menjadi tema pada pelaksanaan penyuluhan.

Dengan tema ini diharapkan Setiap anak, termasuk dari keluarga miskin, memiliki kapasitas pribadi untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam tingkat kecerdasan. Anak-anak diharapkan memiliki kesehatan fisik, psikis, dan sosial yang baik. Kesempatan turut serta dalam proses pendidikan merupakan "pintu masuk" untuk membangun kapasitas anak sebagai sumber daya manusia andal di masa depan.²

Penyuluhan dilakukan dengan teknik *face to face* berhadapan dengan massa dimana secara tim bergantian melakukan *ice breaking* terhadap peserta penyuluhan. Agar dapat memecahkan kebekuan, maka tim penyuluh membuat yel-yel sehingga menumbuhkan semangat dan perhatian untuk peserta. Setelah semangat peserta tumbuh dan atensi mulai tertuju di depan, maka penyuluh mulai memasukkan materi tentang pentingnya Program Keluarga Harapan

¹ Laporan kegiatan penyuluhan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Cipinang Jakarta Timur tahun 2011.

² Siti Nurhayati, Penyuluh Sosial. Wawancara Pribadi, Jakarta April 2012.

konsekuensinya apabila melanggar aturan dan memberi pengetahuan serta mempersuasi warga untuk memanfaatkan bantuan PKH dengan sebaik-baiknya.

Tim Penyuluh melaksanakan penyuluhan sosial melalui media peragaan yaitu dengan pemutaran film penyuluhan yang bertema Program Keluarga Harapan, sebagai upaya penyampaian informasi, motivasi dan edukasi kepada peserta program PKH.

Penyuluhan yang dilakukan dengan mengunjungi rumah-rumah atau home visit yang dilaksanakan pada hari ke dua tanggal 15 Desember 2011. Penyuluh sosial datang ke rumah-rumah para peserta PKH dengan mewancarai salah satu anggota keluarga atau langsung ke peserta program keluarga harapan yang menerima bantuan tunai bersyarat baik ibu yang hamil, ibu yang memiliki balita maupun ibu yang memiliki anak usia sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

B. Peran Penyuluh Sosial dalam meningkatkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin pada program keluarga harapan.

Peran penyuluh sosial dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan dalam penyuluhan, diantaranya pendekatan individu atau perorangan, pendekatan kelompok dan pendekatan masal/Umum.

1. pendekatan individu atau perorangan

Pendekatan penyuluhan yang dilakukan melalui hubungan atau tatap muka antara penyuluh dan peserta program keluarga harapan, dalam hal ini penyuluh secara langsung memberikan informasi, penjelasan tentang program keluarga harapan. Perubahan yang diharapkan dari pendekatan ini adalah perubahan sikap

dan perilaku rumah tangga sangat miskin untuk mau berpartisipasi dalam program keluarga harapan untuk mewujudkan hidup sehat dan cerdas demi masa depan. Seperti yang diungkap oleh ibu Sumiati peserta PKH mengatakan:

Saya merasa senang di datangi penyuluh sosial, penyuluh tidak hanya sekedar mampir, dan melihat-lihat saja tetapi juga mendengarkan masalah apa saja yang kami alami, kami menceritakan penyebab dari anak-anak saya yang sempat berhenti sekolah, kami merasa dekat dekat Ibu-ibu penyuluh, mereka juga berinteraksi dengan anak-anak saya, ibu-ibu penyuluh bercerita dan bertanya kepada anak-anak saya, bagaimana tadi disekolah, ada masalah tidak selama belajar di sekolah, bagaimana rasanya bisa sekolah kembali, saya lihat anak-anak senang ketemu ibu-ibu penyuluh, saya berharap setiap bulannya bisa dikunjungi ibu-ibu penyuluh.

2. pendekatan kelompok

Pendekatan kelompok dijadikan sebagai alat bantu dalam proses penyuluhan. Dalam proses ini penyuluh secara langsung memberikan pesan/informasi, penjelasan-penjelasan tentang PKH, dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan cara berdiskusi bersama ibu-ibu peserta keluarga harapan, pendekatan ini dilakukan karena secara umum. Dalam pendekatan kelompok ini, seperti yang di ungkap ibu tamy:

Dalam pendekatan kelompok ini kami mendatangi salah satu rumah peserta PKH, dalam pertemuan ini kami mengumpulkan beberapa ibu-ibu peserta PKH, disinilah kami berdiskusi dan mendengar cerita dari ibu-ibu PKH, dalam pendekatan kelompok ini banyak hal yang menarik saya lihat, ibu-

ibu peserta PKH lebih terbuka dalam berbicara tentunya mengenai kesehatan ibu-ibu hamil, kemudian bagaimana anak-anak mau bersekolah, ya namanya anak banyak maunya, jarang yang mau mengerti kondisi keluarga, dalam pertemuan ini bukan berarti kami penyuluh menggurui peserta, kami juga ikut berempati. Memang disini kami dibatasi waktu pertemuan, satu hari untuk penyuluhan massal dan dihari keduanya baru kunjungan kerumah-rumah peserta. Terbatasnya tenaga penyuluh, akibatnya ya, tidak bisa kami (penyuluh sosial) untuk mendatangi seluruh rumah para peserta.

3. Pendekatan massal/umum

Pendekatan massal/umum yang diselenggarakan di kantor Kelurahan Cipinang dengan jumlah yang cukup besar kurang lebih seratus peserta yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan. Dalam penyampaian materinya lebih bersifat umum dapat dirasakan bagi semua yang hadir. Melalui pendekatan ini peserta tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, saran atau kritikan tentang materi yang disajikan. Semua proses berlangsung satu arah. Ibu daerah salah satu peserta PKH mengatakan:

Dalam penyuluhan ini yang melibatkan seluruh peserta PKH, kami peserta hanya sebatas mendengar dan melihat materi apa saja yang disajikan yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan maupun masalah-masalah sosial lainnya, disini kami diminta untuk bisa fokus karena ini berkaitan dengan ketentuan dalam PKH, saya dan ibu-ibu yang lain suka dengan materi yang disampaikan, terkadang jenuh juga karena tiap materi yang

disampaikan maupun tayangan filmnya juga berlangsung sangat lama.

Ibu Misnawati penyuluh sosial muda menjelaskan tiga hal penting yang menjadi tujuan penyuluhan sosial/penyuluhan keliling pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Cipinang.³

1. Memberikan informasi dan pengetahuan (*recharge*) kepada masyarakat penerima program PKH untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai apa program PKH dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
2. Memberikan penyadaran kepada masyarakat sasaran agar mampu melaksanakan Program Keluarga Harapan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian sosial.
3. Dalam jangka waktu ke depan bermaksud membentuk *mind set*/ pola pikir masyarakat agar dapat merubah paradigma mereka mengenai bantuan sehingga tidak bergantung dengan bantuan.

C. Analisis Peran

Penyuluhan sosial adalah suatu pendekatan yang berisi tiga komponen dasar yaitu komunikasi, informasi dan edukasi. Penyuluh sosial yang terlibat langsung pada pelaksanaan program keluarga harapan mengetahui langsung kondisi dari peserta program keluarga harapan, pada pertemuan awal yang dilakukan di kantor kelurahan cipinang yang hampir berlangsung selama lima jam Bapak Cecep Sulaiman yang menjabat sebagai kepala seksi pengembangan sosial berpendapat: ⁴

³ Misnawati, Penyuluh Sosial. Wawancara Pribadi, Jakarta April 2012.

⁴ Cecep Sulaiman, kepala seksi pengembangan sosial, Wawancara Pribadi, Jakarta April 2012.

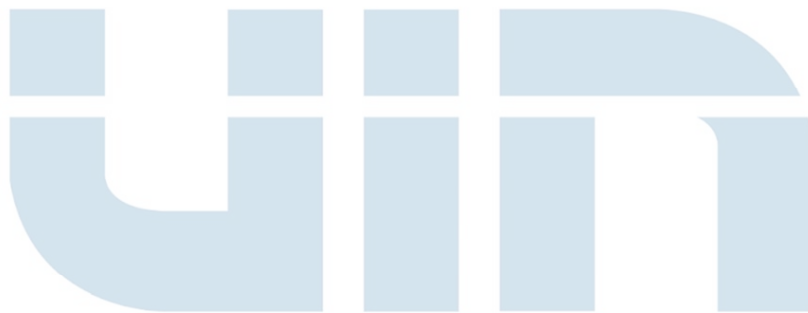
Peran penyuluh sosial tentunya bisa mempercepat dan mempersiapkan dalam program PKH, kemudian peran sebagai mediator, ada konflik dengan keluarga dan masyarakat sekitar, mungkin juga ada persoalan dengan sekolahan menjadi penghubung. Perannya dalam masalah sekolah misalnya, orang miskin biasanya termarjinalkan kadang-kadang haknya tidak terpenuhi, bagaimana menjadi penghubung kedua belah pihak ini bagaimana bisa memberi pelayanan yang baik terhadap peserta PKH, saya kira penyuluh sosial bisa mempersiapkan sebelum dana itu turun kemasyarakat.

Setelah adanya penyuluhan sosial ini, terwujudnya pola pikir yang positif bagi peserta khususnya rumah tangga miskin itu sendiri, terlihat dari meningkatnya angka partisipasi belajar anak disekolah di lingkungan kelurahan cipinang. Adapun terjadi di beberapa peserta yang tidak menggunakan bantuan itu untuk pendidikan maupun kesehatan, ini terjadi karena tidak adanya pemahaman sebelumnya tentang program keluarga harapan ini, walaupun dalam pelaksanaannya yang menerima bantuan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Berbagai macam pendapat dari ibu-ibu peserta PKH, diantaranya ibu sumiati:

Selama saya menjadi anggota PKH saya merasakan banyak perubahan yang sangat terlihat perkembangan sekolah anak saya dengan adanya program ini kami merasa masih ada perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak kami, kami sempat putus asa untuk melanjutkan

pendidikan anak kami, dengan adanya bantuan ini balita bisa mendapatkan gizi yang baik dan pendidikan bagi anak kami yang putus sekolah

Setelah penyuluhan yang diikuti peserta program keluarga harapan, muncul kesadaran dari peserta itu sendiri, dari penyuluhan itu mendapatkan pengetahuan baru yang tentunya belum didapat selama ini. Muncul kebersamaan antar sesama peserta, baik hubungan sosial yang terbangun dengan baik. Para orang tua bersama-sama mengantarkan anak ke sekolah, sering bertanya kepada pendamping yang ada di Kelurahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan penyuluhan keliling, peserta program keluarga harapan yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan dikumpulkan di kantor Kelurahan Cipinang, dalam pertemuan ini peserta mendapat penyuluhan mengenai program keluarga harapan, penyuluh sosial melakukan sosialisasi melalui media peragaan dan pemutaran film yang bertema Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan penyuluhan keliling tidak hanya bertempat di kantor kelurahan saja, penyuluh sosial juga mendatangi rumah-rumah peserta program keluarga harapan.
2. Dalam mewujudkan partisipasi belajar anak rumah tangga miskin, penyuluh sosial mendatangi rumah peserta program keluarga harapan, dalam pertemuan ini anak-anak peserta program keluarga harapan bertemu langsung dengan penyuluh, dalam kunjungan ini penyuluh bercerita dan bertanya kepada anak-anak peserta, mengenai pembelajaran mereka di sekolah.
3. Peran penyuluh sosial sebagai upaya penyampaian informasi, motivasi dan edukasi kepada peserta program keluarga harapan dalam salah satu bentuk mewujudkan partisipasi belajar anak.
4. Peran penyuluh sosial dapat dilihat dari pendekatan yang dilakukan dalam penyuluhan, diantaranya pendekatan individu atau perorangan, pendekatan

kelompok dan pendekatan masal/umum.

5. Penyuluhan sosial pada program keluarga harapan adalah untuk mengubah perilaku rumah tangga miskin, mencakup:
 1. Proses penyebaran informasi yang berkaitan dengan program keluarga harapan dan perubahan cara-cara penanganan memecahkan masalah.
 2. Proses pendidikan.
 3. Proses pengembangan sosial, untuk terciptanya perubahan perilaku rumah tangga miskin sesuai dengan kebutuhan dan harapannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian, ada beberapa saran dan masukan yang penulis pandang sebagai hal yang positif. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyuluh sosial jangan hanya menyampaikan materi saja mengenai pelaksanaan program keluarga harapan, buat juga pelatihan, bagaimana rumah tangga miskin itu bisa juga memenuhi kebutuhan sendiri dengan membuat usaha-usaha kecil.
2. Penyuluh sosial perlu mengelompokkan sesuai dengan kategori bantuan yang mereka terima, baik untuk pendidikan maupun kesehatan. Dengan pengelompokan ini penyuluh bisa tahu dimana kelemahan anak-anak peserta program keluarga harapan dalam belajar dan apa yang

menyebabkan kurangnya partisipasi mereka dalam belajar.

3. Dalam pelaksanaan penyuluhan, anak-anak peserta program keluarga harapan harus diikuti sertakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. 1996. *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Arifin, M. Arifin. 1979. *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rieneka Cipta.
- Buku Pedoman Operasional Program Keluarga Harapan Bagi Para Pemberi Pelayanan Pendidikan*. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI 2011.
- Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI 2011.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- HD, Kaelany. 2005. *Islam dan Aspek-Aspek kemasyarakatan*, edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hatta, Muhammad. 1983. *Ilmu dan Agama*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Iqbal, Muhammad. 1966. *Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam*, Tintamas, Jakarta.
- Kassim, Mauloud. 1983. *Konsep Keadilan Sosial di dalam Islam*, dalam Altaf Gauhar, Tantangan Islam. Pustaka. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke tiga. Balai pustaka Jakarta 2007.
- Kemiskinan dan keberfungsian sosial studi kasus rumah tangga miskin di Indonesia*, Sekolah tinggi kesejahteraan sosial (STKS) bandung Press 2003.
- Kegiatan lembaga swadaya masyarakat memberdayakan kaum miskin dalam perspektif ketahanan nasional (studi kasus jawa tengah)* Tesis Merphin Panjaitan, program pengkajian ketahanan nasional, 1997.
- Lutfi, M. 2008. *Dasar-dasar bimbingan dan penyuluhan (konseking) Islam*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Marimba, Ahmad D. 1989. *pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Maududi, Abul A'la. 1984. *Ajaran-ajaran Al-Qur'an Tentang Ekonomi dan Politik*, dalam Esensi Al-Qur'an. Bandung: Mizan.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nizar, Samsul. 2002. *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat pers.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Rais, M. Amin. 1985. *Arti dan Fungsi Tauhid*, dalam, *Menelan Cakrawala*, Shalahuddin Press, Yogyakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahmat, Jalaluddin. 1983. *Kunci Surga yang terbuang*, Pengantar dalam, Nabil Subhi ath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Bandung: Mizan.

- Rais, M. Amin. 1985. *Arti dan Fungsi Tauhid*, dalam, *Menelan Cakrawala*, Shalahuddin Press, Yogyakarta.
- Ramayulis. 1990. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta : kalam mulia.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2000. *Ekspresi seni orang miskin: Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan*, Nuansa.
- Romly, A.M. 2001. *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Soelaiman, Holil. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Saifuddin, Ahmad A. 1984. *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Da'wah.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam perspektif Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1988. *Teori & Strategi Pembangunan Nasional*. Cet. 6. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Wikipedia, Partisipasi, diakses pada tanggal 3 Maret 2012 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Partisipasi>.
- Winkel, W.S. 1989. *Bimbingan dan Konseling di sekolah menengah*, Jakarta: Gramedia.
- Yamani, Ahmad Zaki. 1978. *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: LSIK, cet. II.

